

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang hidup secara bersama dan membentuk komune. Masing-masing memiliki kepentingan dan kebutuhan yang harus terpenuhi. Untuk menjaga keberlangsungan tersedianya kebutuhan dasar (*basic need*) serta hubungan yang harmonis diperlukan pemimpin dan aturan. Dialektika peradaban manusia menghantarkan lahirnya negara sebagai lembaga yang mengatur warga negara.

Pengaturan negara dilakukan melalui hukum. Dari hukum itu, negara berfungsi untuk mengembangkan agregat praksis rasional sebab pembatasan yang dilakukan oleh hukum negara merupakan pembatasan rasional yang diperlukan bagi keberadaan individu-individu lain. Kebebasan individu ditentukan oleh rasionalitas manusia. Hukum negara menjadi instrumen untuk mengingatkan manusia agar tidak bertindak irrasional (Fathy, 2019)

Namun hukum, agama, ideologi, filsafat dan lain-lain yang merupakan *supra struktur* justru menjadi legitimasi penghisapan atau berlangsungnya tindakan-tindakan irrasional. Kekuasaan yang dimiliki negara dapat memungkinkan berlangsungnya peran melindungi dan memenuhi kepentingan publik namun sebaliknya juga dapat melanggar kepentingan. Oleh karena itu dibutuhkan peran untuk menjinakan kekuasaan negara dan mengarahkan kebijakannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Peran tersebut dapat dilakukan oleh civil society dalam rangka counter hegemoni negara.

Larry Diamond (1994) dalam (Suharno, 2007) mengatakan bahwa *civil society* memberikan kontribusi yang cukup besar bagi tumbuhnya demokrasi dan menekan negara sebagai kelompok dominan. Pertama, *civil society* menyediakan wahana sumber daya politik, ekonomi, kebudayaan dan moral untuk menjaga dan mengawasi keseimbangan negara. Asosiasi independen dan media yang bebas memberikan dasar bagi pembatasan kekuasaan negara melalui kontrol publik. Kedua, *Civil Society* dapat membantu mengembangkan keterampilan warga untuk bekerja dengan satu sama lain untuk memecahkan masalah bersama, untuk memperdebatkan masalah publik, mengekspresikan pandangan mereka dan ikut menjaga stabilitas negara. Dalam arti bahwa *civil society*, karena kemandiriannya terhadap negara, mampu menjaga independensinya yang berarti secara diam-diam mengurangi peran negara.

Adanya peran *civil society* tersebut dapat membela kepentingan kelompok rentan yang merupakan lapisan masyarakat yang paling mendesak yang membutuhkan perhatian lebih untuk memperbaiki kondisi kehidupannya. Kelompok rentan tersebut adalah kelompok masyarakat yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri yang dapat mengakibatkan permasalahan karena ketidakmampuannya tersebut dan patut mendapat sorotan (Hoogeveen, 2004). Pada dasarnya kondisi rentan dapat disebabkan karena kurangnya aset (apa yang dimiliki), akses (geografis), dan sistemik (sistem sumber yang dikuasi oleh golongan tertentu).

Salah satu kelompok rentan tersebut adalah pedagang kaki lima (PKL) yang kepentingannya dalam mencukupi kebutuhan ekonomi terkadang beririsan

dengan kepentingan publik. Pedagang kaki lima yang merupakan sektor informal memiliki kontribusi besar terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Menurut Blunch et al penyerapan tenaga kerja berkisar 77,9 persen dan pada tahun 1998-2006 mencapai lebih dari 57 juta atau lebih dari 60 persen dari angkatan kerja uproduktif (Blunch N. H., 2001).

Alasan sektor ini tumbuh secara signifikan karena menjadi PKL adalah adalah satu-satunya pilihan untuk masyarakat kebawah dan merupakan cara yang paling layak untuk mempertahankan hidup mereka (Handoyo & Setiawan, 2018). PKL juga seringkali menjadi alternative Lapangan kerja ketika program pembangunan tidak mampu memberikan kesempatan kerja di sektor formal (Handoyo & Hadi, 2019). Keberadaan pedagang kaki lima dapat dengan mudah ditemukan di banyak tempat kota-kota di Indonesia, termasuk di Yogyakarta. PKL ini bisa ditemui di sepanjang jalan raya kawasan malioboro, Mangkubumi, Selokan Mataram, dan lokasi lainnya.

Faktanya, situasi yang dihadapi masyarakat PKL merupakan problematika struktural. Menurut (Handoyo & Setiawan, 2018) kehadiran PKL seringkali terkait langsung dengan kebijakan pemerintah kota karena dalam menjalankan bisnis, pedagang menempati ruang publik seperti trotoar, bahu jalan dan mengganggu ketertiban sehingga seringkali melahirkan kebijakan relokasi bahkan pengusuran terhadap PKL. Ditambah pertumbuhan yang cepat dari pedagang kaki lima, terutama yang tidak terorganisir atau PKL tidak terdaftar yang menempati tempat umum telah menyebabkan pemerintah menghadapi dilema.

Situasi inilah yang dihadapi oleh Pedagang kaki lima Selokan Mataram Klebengan, dimana hajat hidup masyarakat PKL yang ditopang melalui kegiatan usaha dagangnya, selalu berhadapan dengan berbagai kebijakan pemerintah yang memberi implikasi terhadap seberapa besar keteraksesan dan kemampuan mereka dalam memanfaatkan lahan (kavling lapak usaha). Tidak sampai disini, setelah memperoleh izin penyediaan lokasi, pemerintah merasa cukup hadir pada hidup dan penghidupan masyarakat PKL dan luput dalam memberikan pembinaan bagi masyarakat PKL. Padahal, hal itulah yang paling dibutuhkan bilamana PKL sudah menempati lokasi usaha. Tanpa pendidikan dan pengetahuan yang dimiliki menempatkan masyarakat PKL pada posisi lemah dan rentan termarjinalkan. Oleh sebab itu, ketika masyarakat PKL menemui masalah, mereka kesulitan untuk mengatasinya.

Untuk mengatasi masalah ini, Front Perjuangan Pemuda Indonesia hadir memberikan pemberdayaan bagi pedagang kaki lima Selokan Mataram Klebengan. Kehadiran lebih lanjut FPPI Pimkot Yogyakarta di tengah-tengah dinamika PPSMK berdasar pada kebelum-matangan organisasi PPSMK untuk memastikan kelanjutan dan keberlangsungan usaha dagangnya sehingga FPPI Pimkot Yogyakarta melanjutkan kerja pendampingannya hingga advokasi yang berorientasi pemberdayaan. Kerentanan mereka juga tidak hanya terkait dengan kebijakan pemerintah daerah tetapi masyarakat PKL seringkali menemui masalah yang di tingkatan horizontalnya berupa persaingan usaha.

Oleh karena itu menarik diteliti bagaimana peran FPPI dalam pemberdayaan pedagang kaki lima Selokan Mataram Klebengan karena FPPI

merupakan organisasi non profit dan melakukan pendanaan untuk kegiatan-kegiatannya hanya melalui dana kolektif anggota. Namun dapat memainkan peran yang harusnya dijalankan oleh negara.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana Peran Front Perjuangan Pemuda Indonesia dalam Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Paguyuban Pedagang Selokan Mataram Klebengan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah di atas adalah :

Mengetahui bagaimana Peran Front Perjuangan Pemuda Indonesi dalam Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Paguyuban Pedagang Selokan Mataram Klebengan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis :

1. Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk menambah kasanah keilmuan dan dapat dijadikan sebagai rujukan atau referensi untuk mengulas lebih dalam tentang kontribusi Front Perjuangan Pemuda Indonesia dalam Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Paguyuban Pedagang Selokan Mataram Klebengan.

1.4.2 Manfaat Praktis :

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kontribusi berupa rekomendasi solusi bagi pemerintah daerah dan organisasi non pemerintah berkaitan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima agar dapat berjalan dengan efektif.

1.5 Literatur Riview

Kehadiran PKL sebagai salah satu sektor informal di perkotaan menimbulkan kesan negative. Penelitian yang dilakukan Hariyatno et al mengenai *A study of the Street Vendor in Indonesia* mengkaji bagaimana ruang publik telah menjadi tempat bekerja bagi kaum miskin kota terutama di negara berkembang dan menimbulkan berbagai permasalahan. Untuk mengatasi penggunaan ruang publik untuk aktivitas Pedagang Kaki Lima Pemerintah kota Bogor melakukan penertiban pedagang kaki lima. Pemerintah Kota Bogor melakukan Alih Fungsi Jalan Merdeka Menjadi Pasar Sementara khusus untuk kebutuhan sehari-hari. Upaya ini merupakan respon pemerintah untuk menghindari penggunaan ruang publik namun dengan tetap memberikan kontribusi yang baik bagi masyarakat sekitar Bawono, A., & Joyo, E. (2020).

Selain adanya kesan negative, Pedakang Kaki Lima seringkali dihadapkan pada kerentanan. Untuk itu pemberdayaan bagi PKL sangat diperlukan. (Syamsir, 2015) mengkaji mengenai *The Empowerment of Marginalized Community (Street Vendors) for Developing Creative Economy in Payakumbuh City West Sumatra*. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang Upaya pemerintah dalam pemberdayaan pedagang kaki lima, dan derajat keberhasilan program

pemberdayaan pedagang kaki lima oleh Pemerintah Kota. Temuan penelitian menunjukkan bahwa upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah yakni melalui Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Barat meluncurkan Program Pendaftaran Pedagang Kaki Lima didukung oleh pemberian dukungan modal. Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Sumatera Barat memberikan dukungan dalam bentuk pinjaman kepada para PKL. Hasilnya, pemberdayaan yang dilakukan tergolong cukup baik, terutama bila diukur berdasarkan pergerakan modal para pedagang kaki lima.

Penelitian serupa oleh Akhmad Ghofar Ismail & Ridwanto Ardi Kusumo mengenai Bagaimana Peran Pemerintah memperkuat PKL di Kabupaten Brebes. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan melakukan penelitian lokasi di Kabupaten Brebes. Pemerintah merumuskan tiga upaya utama dalam setiap komunitas Pemberdayaan, yang disebut Tri Bina: Pembangunan Manusia (Bina Manusia), Bisnis Pembangunan (Bina Usaha), dan Bina Lingkungan. Perkembangan Manusia atau Bina Manusia adalah upaya terpenting yang harus diperhatikan dalam pemberdayaan masyarakat. Bina Lingkungan dilakukan dengan patroli rutin, pengecekan dan pertemuan rutin masyarakat. Bina Lingkungan dengan mengeluarkan peraturan agar terciptanya lingkungan kondusif. (Ismail & Kusumo , 2019).

Penelitian relevan lainnya dilakukan oleh Andi Samsu Alam et al “*The Collaborative Governance In The Development Of Street Vendor KanreRong Karebosi in Makassar City*”. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Hasilnya pemberdayaan yang dilakukan bersifat kolaboratif,

Pemerintah membuat program penataan PKL yaitu menyediakan warung bernama Kaki Lima dan daerah pedagang kaki lima yang disebut Kanrerong ri Karebosi, Pemerintah juga memberikan modal usaha bagi PKL agar dagangannya bisa mengembangkan dan menyediakan barang yang dibutuhkan oleh masyarakat Makassar, Namun, ada keterbatasan dalam kapasitas sehingga mendorong pemerintah untuk bekerjasama dengan berbagai pihak yakni perbankan. Dimana Pemerintah sebagai regulator dan Perbankan memberikan pinjaman modal sebagai bentuk pemberdayaan sehingga mendorong peningkatan dan pembangunan bagi PKL (Alam & Rusli, 2020)

Agus Wijanarko dalam penelitiannya membahas pemberdayaan PKL sebagai masyarakat marjinal untuk meningkatkan pendapatan. Untuk menggali tema penelitian secara mendalam, penulis menggunakan penelitian kualitatif. Salah satu tujuan dari penelitian ini mengetahui sejauh mana peran Lembaga Swadaya Masyarakat dalam upaya pemberdayaan PKL di kawasan Simpang Lima. Hasilnya, Peran dari LSM untuk PKL yakni sebagai mediator antara PKL dengan pemerintah. PKL mendapat izin untuk menjual dagangannya di kawasan Simpang Lima atas bantuan negosiasi oleh LSM (Wijanarko).

Andy Arya Maulana Wijaya “*Street Vendors Resiliencies: The Role of Social Capital and Community Governance*”. Penelitian dilakukan pada kelompok pedagang kaki lima di Baubau. Penelitian ini menjadi salah satu cara untuk mengamati aktivitas yang terjadi pada kelompok PKL. Ini memungkinkan untuk menata dan memberdayakan produktivitas PKL untuk kesejahteraan kelompok dan pengembangan sektor ini. Hasilnya pemerintah daerah melakukan pendekatan

yang dapat digunakan untuk mengatur dan memberdayakan PKL melalui *community governance*. Community Governance digunakan agar peran sentral pemerintah dalam pengaturan PKL bergeser menjadi kolaborasi dengan stakeholders lain (Wijaya, 2020).

Selain dari pemerintah, NGOs memainkan peran penting dalam pemberdayaan, Penelitian P.Narumugai & J.Lalith Kumar mengenai Peran NGO dalam Pemberdayaan. NGOs dan LSM dan memainkan peran yang sangat vital dalam pemberdayaan kelompok. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya pemberdayaan yang dilakukan. Hasilnya NGOs melakukan pemberdayaan untuk kelompok pedesaan dengan menyediakan pendidikan dasar, pelatihan kejuruan, pelatihan wirausaha, bantuan hukum, perlindungan dan program kesadaran diri (P.Narumugai & Kumar, 2017).

Penelitian yang dilakukan oleh ShashidharChannappa et al yakni *Multi Faceted Interventions to Empower Street Vendors in Bengaluru*. Penelitian ini mengkaji bagaimana intervensi Uddyam Foundation dalam pemberdayaan PKL. PKL menghadapi masalah yakni ditipu oleh beberapa kelompok/individu dengan dalih membantu vendors dalam berbagai bentuk. PKL disalahgunakan karena ketidakberdayaannya sehingga NGO melakukan rencana aksi untuk mendidik dan menciptakan kesadaran mereka. Intervensi yang dilakukan oleh Uddyam Foundation dalam pemberdayaan melalui sesi sosialisasi. NGO menyediakan platform untuk bertukar pikiran dan memecahkan masalah yang dihadapi oleh PKL.

Penelitian lainnya dari Dian Eka Rahmawati & Dwi Woro Astuti yakni *NGO And Community Empowerment Based on Local Wisdom in Temanggung*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran LSM Spedagi dalam pemberdayaan masyarakat pedesaan berbasis kearifan lokal melalui kegiatan Pasar Papringan di Temanggung Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Peneliti mengumpulkan data melalui teknik observasi, dokumentasi, dan wawancara. Hasilnya NGO melakukan pengembangan Kapasitas lokal melalui pelatihan, melakukan advokasi, dan mendorong inisiatif masyarakat (Rahmawati & Astuti, 2019).

Penelitian terbaru oleh Wahyu Pramono & Dwiyanti Hanandini mengenai *Best Practices for Management and Empowerment of Street Vendors Padang City in the New Normal Er*. Penelitian dilakukan di Kota Padang dengan PKL sebagai responden. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan angket, kuisioner dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penataan praktik terbaik dan pemberdayaan PKL di Kota Padang diawali dengan perubahan kebijakan Pemerintah Kota Padang yang menempatkan PKL sebagai salah satu sumber kekacauan kota (Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun No. 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Rakyat) menjadi bagian dari sistem perekonomian kota (Kota Padang Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL). Pemberdayaan dilakukan melalui pengembangan kegiatan perdagangan di sektor informal namun ini masih belum optimal peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Banyaknya penelitian terdahulu diatas, sebagian besar menyoroiti strategi pemberdayaan PKL yang dilakukan oleh pemerintah maupun dampak negative yang ditimbulkan akibat adanya keberadaan PKL. Meski beberapa peneliti telah menyoroiti dan mempelajari strategi pemberdayaan yang dilakukan oleh organisasi non pemerintah namun masih adanya *gap* atau kesenjangan dalam ilmu pengetahuan mengenai penelitian tentang pemberdayaan PKL oleh NGO terutama di Yogyakarta.

1.6 Kerangka Teoritik

1.6.1 Civil society

1. Pengertian Civil Society

Konsep civil society atau masyarakat sipil pertama kali diperkenalkan oleh Hegel dalam *Philosophy of Right* pada 1821. Hegel menyebutkan bahwa “*civil society is sphere of ethical life interposed between the family and the state*”. Menurut Hegel dalam (Jensen, 2016) secara sederhana menyatakan bahwa civil society adalah 'bentuk-bentuk asosiasi sosial perantara antara' keluarga dan Negara. Sedangkan definisi seperti itu dianggap kurang detail dan spesifik dan deefinisi ini dikembangkan oleh (Diamond, 1994) yang mengartikan civil society adalah wilayah kehidupan sosial yang terorganisir yang bersifat sukarela, mandiri, swadaya, otonom dari negara, dan terikat oleh tatanan hukum atau seperangkat aturan bersama. Bagi sebagian besar sarjana, aktivis sosial dan praktisi pembangunan definisi civil society adalah 'kumpulan' kelompok kepentingan yang beragam dan organisasi sosial yang cukup kuat untuk memberikan beberapa

otonomi dan perlindungan individu dari kecenderungan otoriter dan hegemonik negara.’

Charles Taylor mendefinisikan masyarakat sipil sebagai jaringan asosiasi otonom yang independen dari negara, yang mengikat warga bersama dalam hal-hal yang menjadi perhatian bersama, dan dengan keberadaan atau tindakan mereka dapat berdampak pada kebijakan publik (Kligman, 1990). Schmitter mendefinisikan masyarakat sipil sebagai sistem kelompok perantara yang terorganisir sendiri (Schmitter, 1995).

2. Perkembangan Civil Society

Untuk terlibat dalam diskusi tentang konsep civil society, seseorang harus memahami asal-usulnya dan bagaimana gagasan civil society telah berkembang sejak saat itu. Perkembangan ini dapat dikategorikan menjadi tiga fase yakni :

A. Filsuf Eropa

Gagasan civil society atau masyarakat sipil muncul di era Pencerahan dengan pemikir seperti Rousseau dan Kant, yang menganggap masyarakat sipil identik dengan negara atau masyarakat politik. Faktanya, masyarakat sipil adalah jenis negara yang diatur oleh kontrak sosial disepakati di antara anggota individu masyarakat. Adam Ferguson dan Francis Hutcheson, perubahan besar dalam mengkonseptualisasikan masyarakat sipil, ketika masyarakat sipil dipandang sebagai perlindungan kebebasan pribadi terhadap kekuasaan negara. Masyarakat sipil mulai dipisahkan dari negara, dan dipandang sebagai asosiasi sukarela yang diorganisir sebagai bagian dari

perlawanan terhadap gangguan negara di hak dan kebebasan individu (Jensen, 2016). Oleh akademisi Robert Putnam, yang saat ini adalah orang yang paling terkait dengan gagasan bahwa masyarakat sipil yang dinamis sebagai dasar dari pemerintahan demokratis yang stabil Edward dalam (Jensen, 2016). Definisi tersebut menyempit lagi pada abad kedua puluh, ketika masyarakat sipil dipahami sebagai menempati ruang di luar pasar, negara, dan keluarga. Di dalam perjalanannya, masyarakat sipil menjadi ranah budaya, ideologi, dan debat politik, Marxis Italia, Antonio Gramsci, adalah pemikir yang paling terkait dengan definisi ini (Jensen, 2016).

Terlepas dari perubahan dalam istilah tersebut, semua definisi yang berbeda memiliki makna inti yang sama, karena semuanya tentang aturan masyarakat yang diatur berdasarkan kontrak sosial antar individu.

B. Gerakan sosial tahun 1970-an dan 1980-an di Amerika Latin dan Eropa

Timur

Gagasan masyarakat sipil berkembang lagi pada 1970-an dan 1980-an di Amerika Latin dan Eropa Timur. Konsep tersebut menjadi banyak digunakan untuk menggambarkan gerakan sosial melawan kediktatoran militer dan totalitarianisme. Orang-orang menyadari penggulingan rezim dari atas ke bawah tidak realistis (Kaldor, 2003) Masyarakat sipil di sini mengacu pada potensi masyarakat lokal untuk mengubah hubungan antara negara dan masyarakat, berjuang untuk pemerintahan yang lebih demokratis, dan redistribusi kekuasaan dan kekayaan ekonomi (Leeuwen, 2009).

Sebagai hasil dari konteks konflik ini, harapan masyarakat sipil tumbuh tinggi.

Lembaga negara terbukti gagal dalam memberikan keamanan, akuntabilitas, dan pelayanan kepada warganya. Masyarakat sipil menjadi dianggap lebih efektif daripada pemerintah dalam menyediakan kebutuhan pembangunan. Gagasan masyarakat sipil dianggap sebagai prasyarat demokrasi menyebar selama tahun 1990-an.

C. Agenda neoliberal tahun 1990-an

Dengan berakhirnya Perang Dingin pada tahun 1989, gagasan masyarakat sipil meluas signifikan lagi, dan menjadi dipahami dengan cara yang berbeda. Untuk gerakan sosial dan aktivis yang peduli dengan isu-isu seperti hak asasi manusia, perubahan iklim, AIDS/HIV, dll. Untuk pemerintah Barat dan lembaga internasional masyarakat sipil muncul untuk tujuan “pemerintahan yang baik” dalam “Kebijakan Baru” sehingga mereka yakin kontribusi positif masyarakat sipil untuk mempromosikan demokrasi dan untuk memfasilitasi pasar reformasi. Di sini, masyarakat sipil pada dasarnya berdiri untuk LSM, baik internasional maupun lokal (Leeuwen, 2009).

Sedangkan perkembangan konsep *civil society* di Indonesia sebenarnya terkait dengan perkembangan politik era orde baru. Pada saat itu, negara dapat mengatur dan melakukan intervensi dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu konsep *civil society* lebih semacam “political society”. Dengan demikian, usaha mewujudkan *civil society* untuk mengurangi kekuasaan dan kontrol Negara. Gramsci membedakan *civil society* dengan *political society*. *Political society* atau aparat Negara melakukan monopoli Negara dengan pemaksaan terdiri dari polisi, tentara,

lembaga hukum, administrasi (pajak, perdagangan, keuangan). Sedangkan *civil society* yakni adanya relasi atau hubungan antar kelompok tanpa adanya unsur pemaksaan, seperti organisasi privat, serikat dagang, sekolah dan termasuk keluarga (Suharno, 2007).

Umumnya, *civil society* bermanifestasi sebagai organisasi non-pemerintah (LSM) serta kelompok dan lembaga serupa lainnya. Organisasi-organisasi ini biasanya dijalankan oleh orang-orang yang mengalami semacam ketidakpuasan dengan status quo, yang kemudian melalui kekuatan masyarakat sipil kolektif, mengadvokasi perubahan yang mereka inginkan. *Civil society* seringkali terdiri dari kelompok orang yang terpinggirkan, tertindas atau kurang terwakili. *Civil society* dapat terbentuk di mana saja di mana orang-orang mengalami ketidaksetaraan ini, tetapi mereka sangat umum di antara kelompok-kelompok dan negara-negara yang memiliki sejarah panjang ketidakstabilan ekonomi dan politik. Dalam situasi ini, masyarakat sipil menciptakan suara dan ajakan bertindak bagi orang-orang tanpa otonomi dan akses (turner, 2016).

1.6.2 Civil Society Organization

Civil Society Organization (CSO) adalah organisasi yang dibentuk masyarakat di luar pemerintah dan market bisnis (untuk mencari keuntungan) untuk mendukung aspek kehidupan sosial yang menjadi kepentingan bersama (Probosiwi, 2018). Dalam perkembangannya, *civil society organization (CSO)* muncul sebagai wadah organisasi masyarakat sipil selain non-

government organization (NGO). *Civil society organization* merupakan wadah yang cukup menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Tujuan Civil Society Organization yakni menghubungkan orang-orang miskin atau terpinggirkan dengan kelompok-kelompok yang dapat memobilisasi dukungan untuk membantu.

Peran Civil Society Organization :

1. Meningkatkan akuntabilitas vertical karena Civil Society Organization dapat merangsang hubungan kekuasaan yang efektif antara Negara dengan warga
2. Meningkatkan akuntabilitas horizontal karena Civil Society Organization dapat menciptakan check and balances antar lembaga-lembaga Negara. CSO dapat mengungkapkan penyalahgunaan kekuasaan, memonitor dan menekan lembaga hukum untuk bertindak melawan pelaku korupsi.
3. CSO memiliki posisi sentral dalam menjembatani kesenjangan. CSO sering memainkan peran sebagai mediator antara mereka yang memerintah dan mereka yang diatur dan meningkatkan tanggung jawab serta respons dari semua pihak.
4. Memberdayakan masyarakat. Organisasi masyarakat sipil memberikan suara kepada segmen masyarakat yang tidak terorganisir dan tidak bersuara. Mereka meningkatkan kesadaran akan masalah sosial dan mengadvokasi perubahan, memberdayakan masyarakat lokal untuk

mengembangkan program baru untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri

Civil Society Organization (CSO) menurut Suharko memiliki beberapa karakteristik, yaitu :

1. CSO Memiliki kepedulian yang berhubungan dengan tujuan –tujuan publik dari pada tujuan tujuan privat
2. Berhubungan dengan Negara dalam berbagai cara namun tidak berupaya untuk memenangkan kontrol atas atau posisi dalam Negara.
3. Tidak berupaya memonopoli ruang politis dan fungsional dalam masyarakat
4. Mempresentasikan kepentingan kelompok yang berbeda-beda atau meliputi aspek aspek yang beragam dari suatu kepentingan

Contoh Organisasi Masyarakat Sipil antara lain:

1. Gereja dan organisasi berbasis agama lainnya
2. Grup online dan komunitas media sosial
3. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan lembaga nonprofit lainnya
4. Serikat pekerja dan kelompok perundingan bersama lainnya
5. Inovator, pengusaha dan aktivis
6. Koperasi dan kolektif
7. Organisasi akar rumput

Di Indonesia, Salah satu CSO yakni Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI). FPPI merupakan kumpulan intelektual pekerja dan rakyat terdidik untuk

mewujudkan masyarakat Indonesia yang republica. FPPI dapat menjadi potensi civil society yang efektif di Indonesia karena merupakan organisasi pergerakan pemuda berskala Nasional. Namun FPPI tidak sekedar terdiri dari mahasiswa, melainkan terdiri dari anggota yang berlatang belakang buruh, pedagang, petani bahkan advokat. Sehingga dalam melaksanakan kerja pergerakannya, didasarkan pada logika sektoral masyarakat, baik untuk masyarakat Buruh, Pedagang Kaki Lima dan lain sebagainya.

1.6.3 Pemberdayaan Sector Ekonomi Informal

Pemberdayaan adalah suatu proses dalam mencapai tujuan memperkuat individu atau kelompok individu yang terbelakang atau rentan. Perkins dan Zimmermans mendefinisikan Pemberdayaan sebagai proses berkelanjutan yang disengaja yang berpusat pada komunitas lokal, yang melibatkan rasa saling menghormati, refleksi kritis, kepedulian, dan partisipasi kelompok, di mana orang-orang yang kurang memiliki bagian yang sama dari sumber daya yang berharga mendapatkan akses dan kontrol yang lebih besar atas sumber daya tersebut (Perkins & Zimmerman).

McWhirter dalam definisi pemberdayaan menyerukan perhatian secara eksplisit pada kesejahteraan komunitas. Pemberdayaan ini meliputi proses yang dilakukan oleh orang, organisasi, atau kelompok tak berdaya untuk mengembangkan keterampilan dan kapasitas untuk memperoleh hasil. Dalam definisi ini, McWhirter, meningkatkan kekuatan populasi yang terpinggirkan dalam pekerjaan mereka menuju keadilan sosial dan mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial.

Pemberdayaan oleh Mardikanto (2010) sebagai proses perubahan sosial, ekonomi dan politik untuk memberdayakan dan memperkuat kemampuan masyarakat/lembaga melalui kebersamaan yang partisipatif, dalam rangka mengubah sikap terhadap semua pemangku kepentingan itu sendiri (individu, kelompok, lembaga). Para pemangku kepentingan ini terlibat dalam proses pembangunan demi kehidupan yang lebih berdaya, mandiri dan partisipatif yang semakin sejahtera secara berkesinambungan.”

Jenis pemberdayaan yakni :

1. Pemberdayaan individu. Pemberdayaan individu adalah proses pengembangan pribadi, Proses tersebut melibatkan pengembangan keterampilan dan kemampuan seseorang. Tujuannya terkait erat dengan peningkatan nyata seseorang atau individu dalam pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sumber daya, dan peluang hidup.
2. Pemberdayaan komunitas yakni suatu konsep atau agenda atau kegiatan untuk mendukung kemampuan komunitas.

Secara konseptual, pemberdayaan memiliki tiga elemen, yakni :

1. Pertama menciptakan atmosphere, kondisi atau iklim yang memungkinkan individu, kelompok atau komunitas untuk berkembang.
2. Kedua, ini adalah aktivitas untuk memperkuat potensi atau kekuatan yang dimiliki oleh individu, kelompok atau komunitas. Potensi ini dapat diperkuat melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan.

3. Ketiga, kegiatan pemberdayaan berarti memberikan perlindungan yakni melindungi individu, kelompok atau komunitas lemah dan rentan agar mereka memiliki kekuatan untuk mengatur hidup mereka.

Indikator Pemberdayaan menurut Mardikanto & Soebianto meliputi berbagai perbaikan antara lain:

1. Perbaikan Kelembagaan

Perbaikan kelembagaan merupakan proses sistematis yang menjadikan organisasi atau lembaga menjadi dinamis, berdaya dan lebih baik untuk mempertahankan eksistensinya. Tujuannya yakni menciptakan komunitas yang mandiri dalam hal ini meningkatkan modal sosial bagi komunitas rentan.

2. Perbaikan aksesibilitas

Perbaikan aksesibilitas berkaitan dengan penertiban pelaku usaha sehingga tidak mematikan usaha mereka.

3. Perbaikan usaha

Perbaikan usaha digambarkan sebagai proses ‘sesuatu yang bergerak dari satu keadaan ke keadaan yang dianggap lebih baik’, biasanya melalui beberapa tindakan atau intervensi yang dimaksudkan untuk membawa perubahan dan peningkatan. Peningkatan usaha termasuk pendekatan sistematis untuk membantu organisasi mengoptimalkan proses dan prosedur yang mendasarinya untuk mencapai hasil yang lebih efisien. Perbaikan

usaha dapat dilakukan melalui ketersediaan bahan baku, sarana prasarana, ketersediaan modal, pengembangan sumber daya manusia.

4. Perbaiki pendapatan

Perbaiki pendapatan adalah upaya yang dilakukan untuk memperoleh manfaat ekonomi yang lebih baik dari suatu aktivitas.

Perbaiki pendapatan dapat dilakukan melalui inovasi produk, kebutuhan promosi dan permintaan pelanggan.

Kegiatan pemberdayaan lebih disukai dalam kelompok lemah, rentan, dan orang-orang marjinal, dengan tujuan memperkuat potensinya. Di banyak kasus di Indonesia, kelompok terpinggirkan yakni termasuk para pekerja sector informal salah satunya Pedagang Kaki Lima atau pedagang asongan.

Menurut (Handoyo & Setiawan, 2018) para pedagang kaki lima yang menjual dagangannya di berbagai pelosok kota sebenarnya adalah sekelompok orang yang tergolong terpinggirkan dan tidak berdaya. Mereka dikatakan marjinal karena mereka dikecualikan dari rata-rata aliran kehidupan kota. Mereka dikatakan tidak berdaya, karena biasanya tidak terjangkau dan tidak dilindungi undang-undang, sehingga perlu diberikan pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup.

Stigma negative kerap muncul tentang keberadaan PKL sebagai bagian dari perekonomian informal terkait tentang keindahan kota. Dilihat dari segi estetika lingkungan dimana PKL cenderung terkesan semrawut, kumuh, dan

mengganggu keindahan kota, sehingga keberadaan pedagang kaki lima di berbagai daerah perlu digusur ke tempat lain. Banyak otoritas di Afrika, Asia, dan Amerika Latin mengeluhkan keberadaan pedagang kaki lima sebagai masalah yang signifikan dalam kota dan para pedagang ini ditargetkan oleh polisi dan pemerintah kota untuk penggusuran.

Terlepas dari stigma negative PKL, memiliki kekuatan yakni :

1. Pedagang kaki lima memberikan kesempatan kerja yang umumnya sulit di dapat pada Negara-negara berkembang. Dengan meningkatnya migrasi perkotaan dan menyusutnya sektor formal, pedagang asongan dan pedagang kaki lima telah muncul sebagai salah satu cara penting untuk mencari nafkah bagi kaum miskin perkotaan di India.
2. Preferensi untuk mendirikan sektor ini karena tidak membutuhkan modal yang besar
3. Sektor ini "bebas" dari pajak pemerintah dan hampir tidak memiliki risiko yang signifikan dalam menjalankan kegiatan usaha ini.
4. Pedagang kaki lima menyediakan makanan, barang sektor informal relatif lebih murah.

1.7 Definisi Konseptual

Definisi Konseptual adalah batasan-batasan yang menjadi pedoman untuk memudahkan pencarian data dalam penelitian. Untuk memahami penafsiran dari teori-teori diatas, maka ditentukan beberapa definis konseptual, yaitu :

1. Civil Society

Civil society adalah wilayah kehidupan sosial yang terorganisir yang bersifat sukarela, mandiri, swadaya, otonom dari negara, dan terikat oleh tatanan hukum atau seperangkat aturan bersama.

2. Civil Society Organization (CSO)

Civil Society Organization (CSO) adalah kumpulan masyarakat dalam sebuah wadah yang memiliki tujuan bersama untuk meningkatkan kualitas hidup anggotanya ataupun masyarakat banyak.

3. Pemberdayaan

Pemberdayaan menyerukan perhatian secara eksplisit pada kesejahteraan komunitas. Pemberdayaan ini meliputi proses yang dilakukan oleh orang, organisasi, atau kelompok tak berdaya untuk mengembangkan keterampilan dan kapasitas untuk memperoleh hasil berupa peningkatan kualitas hidup. Dalam pemberdayaan PKL di Selokan Mataram Klebengan tahun 2020, penulis menggunakan indikator pemberdayaan Mardikanto & Soebianto yakni :

- a. Perbaikan Kelembagaan : Perbaikan kelembagaan merupakan proses sistematis yang menjadikan organisasi atau lembaga menjadi dinamis, berdaya dan lebih baik untuk mempertahankan eksistensinya.
- b. Perbaikan Aksesibilitas : berkaitan dengan penertiban pelaku usaha sehingga tidak mematikan usaha mereka.

- c. Perbaikan Usaha : Peningkatan usaha termasuk pendekatan sistematis untuk membantu organisasi mengoptimalkan proses dan prosedur yang mendasarinya untuk mencapai hasil yang lebih efisien.
- d. Perbaikan Pendapatan : Perbaikan pendapatan merupakan upaya yang dilakukan untuk memperoleh manfaat ekonomi yang lebih baik dari suatu aktivitas

1.8 Definisi Operasional

Definisi Operasional yakni indikator-indikator dalam mengukur variable penelitian yang diturunkan dari kerangka teori. Menurut Sudaryono, definisi operasional dapat didefinisikan sebagai petunjuk dalam mempermudah peneliti menentukan sebuah variable dan indikator yang akan diuji secara empiris (Sudaryono, 2017). Sehingga dalam penelitian ini akan memaparkan indikator tentang. Adapun indikator-indikator mengenai yakni sebagai berikut :

Table 1.1 Definisi Operasional

Variable	Indikator
Perbaikan kelembagaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan Kapasitas Organisasi Paguyuban (PPSMK) 2. Membangun Solidaritas dan Kerjasama Antar Paguyuban
Perbaikan akses	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menciptakan Akses Jalan Transportasi Lancar dan Aman.
Perbaikan usaha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan Sarana Prasarana 2. Pengembangan Metode Usaha Dagang (Online Marketing) 3. Peningkatan Kualitas Produk dan Pelayanan
Perbaikan Pendapatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penertiban Menu Pedagang

Sumber: Diolah oleh Peneliti

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang prosedurnya menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata dari pelaku yang akan diamati (Creswell, 2016). Menurut Sugiyono dalam bukunya “Qualitative Research in Education” penelitian kualitatif merupakan sumber data langsung dan peneliti adalah alat kuncinya. Sehingga melalui penelitian kualitatif diharapkan penelitian ini dapat mengungkapkan secara mendalam mengenai bagaimana peran Front Perjuangan Pemuda Indonesia dalam pemberdayaan pedagang kaki lima di Selokan Mataram Klebengan berdasarkan data-data yang diperoleh melalui keterlibatan langsung maupun tidak langsung dalam proses penelitian.

1.9.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di sisi sungai Selokan Mataram lingkungan Klebengan RT/RW: 09/02. Lokasi ini ditentukan dengan metode *purposive sampling*. Menurut (Sugiyono, 2015) *purposive sampling* merupakan teknik menentukan lokasi penelitian secara sengaja berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tertentu.

Peneliti memilih lokasi ini dengan pertimbangan adanya Pemberdayaan yang dilakukan oleh LSM yakni Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI) dalam pemberdayaan PKL di sisi sungai Selokan Mataram lingkungan Klebengan.

1.9.3 Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yakni *Purposive Sampling*. (Sugiyono, 2015) menjelaskan *Purposive sampling* dilakukan dengan mengambil sampel data berdasarkan atas pertimbangan kriteria tertentu yang dianggap bersangkutan dengan penelitian yang dilakukan. Teknik *Purposive sampling* juga menjelaskan narasumber yang dipilih, dimana pemilihan narasumber berdasarkan ciri-ciri tertentu yakni pihak-pihak yang mengetahui dan yang berhubungan dengan Pemberdayaan PKL di Selokan Mataram lingkungan Klebengan. Adapun Narasumber dalam penelitian terdiri dari Ketua FPPI, anggota FPPI, PKL, ketua RT dan konsumen.

1.9.4 Jenis data

1. Data Primer

Sugiyono mengatakan bahwa data primer diperoleh dari sumber asli atau narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini dan mampu memberikan berbagai informasi. Pada penelitian ini data primer diperoleh dengan wawancara melalui daftar pertanyaan yang diberikan kepada sumber yang mengetahui pokok permasalahan atau yang terlibat dalam pemberdayaan PKL di Selokan Mataram lingkungan Klebengan.

Table 1.2 Narasumber

Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data
1. Ketua Front Perjuangan Pemuda Indonesia 2. Anggota Front Perjuangan Pemuda Indonesia 3. Pedagang Kaki Lima PPSMK 4. Ketua RT 5. Konsumen	Wawancara

Sumber: Diolah oleh Peneliti

2. Data Sekunder

Data sekunder yakni data yang dikumpulkan sebagai penunjang data primer. Data sekunder diperoleh dengan cara studi keperpustakaan dari berbagai media seperti buku, dokumen, artikel, jurnal, undang-undang, maupun peraturan-peraturan yang masih relevan dengan penelitian (Arikunto, 2010). Pada penelitian ini peneliti akan memperoleh data sekunder melalui :

Table 1.3 Data Sekunder

No	Sumber Data Sekunder
1	Data/tulisan dari FPPI mengenai rencana aksi Pemberdayaan
2	Dokumentasi Pemberdayaan yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan
3	Jurnal tentang pemberdayaan
4	Jurnal tentang peran organisasi non pemerintah/LSM dalam Pemberdayaan

Sumber : Data Olahan Peneliti

1.9.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang valid dalam penelitian di Lapangan, maka digunakan teknik antara lain :

1. Wawancara

Wawancara bertujuan untuk memperoleh data yang valid dan relevan mengenai penelitian ini, informan yang dipilih adalah pihak-pihak yang mengetahui dan terlibat dalam upaya Pemberdayaan. Peneliti akan melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait yang dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 1.4 Narasumber

Narasumber	Nama	Hasil yang akan diperoleh dari wawancara	Jumlah Narasumber
Ketua FPPI	Muhammad Yusron	Informasi mengenai hasil dan strategi pemberdayaan yang dilakukan	1 orang
Anggota FPPI	Rudi	Informasi mengenai hasil dan strategi pemberdayaan yang dilakukan	1 orang
PKL	Fedo, Dani, Yanti	Mengetahui hasil atau dampak yang dirasakan dari pemberdayaan	3 orang karena informan kooperatif selama wawancara sehingga memperoleh informasi yang cukup
Ketua RT	Haryono	Mengetahui pendapat terkait pemberdayaan yang dilakukan FPPI	1 orang
Konsumen	Sadiq, Rahma	Aktor yang memberi penilaian terhadap hasil kegiatan pemberdayaan	2 orang karena telah memperoleh informasi yang cukup

Sumber: Diolah oleh Peneliti

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan dokumentasi, foto, buku, maupun karya yang berkaitan dengan penelitian (Sugiyono, 2017). Pada penelitian ini peneliti akan memperoleh data dokumentasi

mengenai Peran Front Perjuangan Pemuda Indonesia dalam Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Paguyuban Pedagang Selokan Mataram Klebengan.

1.9.6 Teknik Analisa Data

Teknik analisis data pada penelitian kualitatif melakukan analisis data yang dilakukan dari awal penelitian hingga akhir penelitian (Sudaryono, 2017:239). Pengertian mengenai analisis data adalah mengumpulkan dan menyusun data secara sistematis dari informasi yang telah diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi menjadi sebuah kalimat atau kata sehingga mudah dipahami dan dapat menjadi informasi bagi orang lain.

a) Reduksi Data

Pada proses ini penulis memilih data mentah yang telah diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi yang dirubah menjadi sebuah narasi atau tulisan yang kemudian dikategorikan sesuai dengan fokus bahasan masing-masing (Yusuf, 2014:407).

b) Display Data

Kumpulan informasi yang didapat kemudian disusun secara sistematis untuk mempermudah penyampaian informasi mengenai Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Selokan Mataram Klebengan (Yusuf, 2014:408).

c) Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan memiliki arti sebagai proses dari verifikasi data-data yang telah diperoleh kemudian disaring yang kemudian akan menjawab pertanyaan penelitian (Yusuf, 2014:409).